

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PARTISIPASI PENDIDIKAN KASAR USIA 16-18 TAHUN DI
INDONESIA

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memlperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Padang
(Unp)*



Oleh:

JUNIYO PRIMA

BP/NIM 2010/18990

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
PENDIDIKAN KASAR USIA 16-18 TAHUN DI INDONESIA**

Nama : Juniyo Prima
NIM/TM : 18990/2010
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

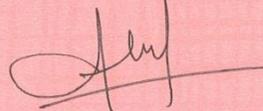
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



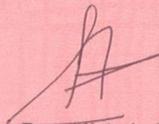
Prof. Dr. Syamsul Amar, B, MS
NIP. 19571021 198603 1 001

Pembimbing II



Ariusni, SE, M.Si
NIP. 19770309 200801 2 001

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

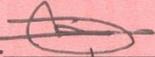
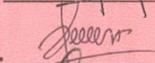
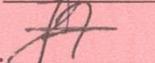
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
PENDIDIKAN KASAR USIA 16-18 TAHUN DI INDONESIA**

Nama : Juniyo Prima
NIM/TM : 18990/2010
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Prof. Dr. Syamsul Amar, B, MS	1. 
2	Sekretaris	: Ariusni, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	: Dewi Zaini Putri, SE, MM	3. 
4	Anggota	: Drs. Ali Anis, M.S	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Juniyo Prima
NIM / Tahun Masuk : 18990/2010
Tempat / Tanggal Lahir : Padang, 29 Juni 1991
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perumahan Pondok Pinang L.12 Lubuk Buaya,
Padang
No. HP / Telepon : 085274082005
JudulSkripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Partisipasi Pendidikan Kasar Usia 16-18 Tahun
Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis / skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karyatulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2018

Yang menyatakan,


Juniyo Prima
NIM.18990/2010

ABSTRAK

Juniyo Prima : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pendidikan Kasar Usia 16-18 Tahun di Indonesia.
2010/18990 Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Bapak Prof.Dr. Syamsul Amar, B,MS dan Ibuk Ariusni, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita, daya tampung SMA dan tingkat kelulusan SMP secara bersama-sama terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia. Jenis penelitian ini tergolong deskriptif dan asosiatif. Tempat dan waktu penelitian ini di Indoneisia pada Februari 2017. Variabel penelitian ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita, daya tampung SMA dan tingkat kelulusan SMP. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian ini menggunakan model panel. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, asumsi klasik dan analisis induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) Uji Chow dan Hausman (2) Uji Asumsi Klasik (3) Regresi Panel (4) Koefisien Determinasi (5) Uji F (6) Uji t

Hasil penelitian menunjukkan (1) pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0,52 dan tidak signifikan ($prob=0,57$) terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia (2) Pendapatan perkapita berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 61,07 dan signifikan ($prob=0,00$) terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia (3) Daya tampung SMA berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0,15 dan signifikan ($prob=0,00$) terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia (4) Tingkat kelulusan SMP berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0,11 dan signifikan ($prob=0,04$) terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan publik dan makroekonomi serta mendorong peningkatan infrastruktur pendidikan, yaitu dengan meningkatkan jumlah sekolah di setiap daerah dan memperbaiki fasilitas sarana pendidikan di setiap sekolah.

Kata kunci: *Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Partisipasi Pendidikan Kasar*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan pada ALLAH SWT karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian shalawat beriringan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini Berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pendidikan Kasar Usia 16-18 Tahun Di Indonesia*”. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan yang banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof.Dr. Syamsul Amar B,M.S selaku pembimbing I dan Ibuk Ariusni SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Seiring dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan hormati serta semua keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof.Dr. Syamsul Amar B,M.S, selaku pembimbing I dan penasehat akademis yang telah memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Ariusni SE, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen penguji skripsi yaitu Bapak Drs. Ali Anis, M.S dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM.
5. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

6. Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Ilmu Ekonomi angkatan 2010 yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis, Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	14
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Konseptual	32
D. Hipotesis	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Definisi Operasional	38
F. Teknik Analisis Data	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pendidikan Kasar Usia 16-18 Tahun Di Indonesia	35

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Angka Partisipasi Kasar Usia 16-18 Tahun, APBD Pendidikan, PDRB per kapita, Daya Tampung SMA, dan Tingkat Kelulusan SMP di Indonesia beserta Pertumbuhan Masing-Masingnya Tahun 2010-2016	4
2. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Usia 16-18 Tahun Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2016	52
3. Perkembangan APBD Pendidikan Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2016	55
4. Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2016	58
5. Perkembangan Daya Tampung SMA negeri Menurut Provinsi di Indonesi Tahun 2010-2016	61
6. Perkembangan Tingkat Kelulusan SMP Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2016.....	64
7. Hasil Uji Chow Test.....	66
8. Hasil Uji Hausman	67
9. Hasil Uji Multikolinearitas.....	68
10. Hasil Uji Heterokedastisitas	69
11. Hasil Estimasi Fixed Effect Model	70

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>	Halaman
1. Data Angka Partisipasi Kasar Usia 16-18 Tahun, APBD Pendidikan, PDRB Perkapita, Daya Tampung SMA, dan Tingkat Kelulusan SMP Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2016.....	95
2. Hasil Olahan Data Dengan Menggunakan Metode <i>Common Effect Model</i>	103
3. Hasil Olahan Data Dengan Menggunakan Metode <i>Fixed Effect Model</i>	104
4. Uji Chow	105
5. Hasil Olahan Data Dengan Menggunakan Metode <i>Random Effect Model</i>	106
6. Uji Hausman	107
7. Hasil Olahan Data Dengan Uji Asumsi Klasik.....	109
8. Tabel t.....	110
9. Tabel F	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan bangsa dan negara karena kecerdasan dan kemampuan bahkan watak bangsa di masa akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini. Melalui pendidikan, seorang dapat meningkatkan ketrampilan serta kemampuannya untuk berfikir. Selanjutnya hal tersebut pada akhirnya akan bermanfaat sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja, untuk meningkatkan produktivitas. Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa melihat pada status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, bahkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya.

Sulistiyastuti (2007) menyatakan bahwa pemenuhan atas hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia. Pendidikan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah yang pada akhirnya dapat mendorong keberhasilan pembangunan wilayah tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan,

dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu indeks yang penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai, maka pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Diharapkan dengan pendidikan akan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktifitas dan juga lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Tapi masalahnya pendidikan masih merupakan barang mahal bagi kebanyakan rakyat Indonesia. Adanya program wajib belajar 9 tahun dapat membantu masyarakat untuk terus bersekolah hingga SMP tanpa harus membayar untuk biaya pendidikan. Tapi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA masyarakat sudah harus mengeluarkan biaya pendidikan yang tidak sedikit. Ditambah lagi jika dibandingkan tingkat SD dan SMP jumlah sekolah tingkat SMA jauh lebih sedikit, akibatnya tidak semua calon siswa dapat tertampung di SMA. Hal ini tentu akan mendorong semakin rendahnya tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang SMA.

Indikator yang digunakan pemerintah untuk melihat seberapa jauh keberhasilan usaha pemerintah di sektor pendidikan, yaitu dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dalam penelitian ini menggunakan Angka Partisipasi Kasar

(APK) untuk mewakili indikator keberhasilan sektor pendidikan. Menurut BPS (2017) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Dimana sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Hal ini berarti APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Fenomena yang terjadi di Indonesia yakni tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia makin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan data dari BPS, menunjukkan pada tahun 2016 persentase APK usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun sudah berada diatas 90%, sedangkan APK usia 16-18 tahun masih berada dibawah 90%, dengan rata-rata APK tahun 2010-2016 adalah sebesar 70,90%. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN 2010-2014 target APK usia 16-18 pada tahun 2014 yaitu 79,20% belum mampu tercapai, dimana realisasi APK hanya sebesar 74,26%. Sedangkan pada RPJMN 2015-2019, program

Wajib Belajar(Wajar) 12 Tahun merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2019. Untuk mencapai sasaran siswa yang berpartisipasi pada sekolah menengah ditetapkan bahwa sasaran APK usia 16-18 tahun pada tahun 2019 sebesar 91,63 persen dengan sasaran awal pada tahun 2015 sebesar 82,42persen. Kenyataannya, pencapaian APK 16-18 tahun nasional masih di bawah sasaran yaitu hanya sebesar 78,02 persen pada tahun 2015.

Masih rendahnya APK usia 16-18 tahun menunjukkan masih minimnya akses penduduk dalam mengenyam pendidikan pada jenjang menengah atas. Terdapat faktor-faktor baik dari sisi penawaran maupun permintaan terhadap pendidikan itu sendiri. Diantaranya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, daya tampung sekolah, pendapatan keluarga, banyaknya beban tanggungan keluarga, akses yang minim dari tempat tinggal menuju sekolah, rendahnya kesadaran diri, serta faktor-faktor lain yang membuat masih rendahnya partisipasi pendidikan di Indonesia.

Tabel.1.1 Angka Partisipasi Kasar Usia 16-18 Tahun, APBD Pendidikan, PDRB Perkapita, Daya Tampung SMA dan Tingkat Kelulusan SMP Di Indonesia Beserta Pertumbuhan Masing-Masingnya Tahun 2010-2016

Tahun	APK 16-18 Tahun (Persen)	Prt (%)	APBD Pend. (milyar)	Prt (%)	PDRB Per Kapita (juta)	Prt (%)	Daya Tampung SMA (persen)	Prt (%)	Tingkat Kelulusan SMP (persen)	Prt (%)
2010	62,85	-	385,26	-	30,76	-	53,56	-	95,89	-
2011	64,90	3,26	451,10	17,09	31,97	3,93	49,34	-7,88	98,69	2,92
2012	68,80	6,01	492,58	9,22	33,25	4,00	51,75	4,88	98,31	-0,39
2013	66,61	-3,14	564,98	14,70	34,79	4,63	48,08	-7,09	98,51	0,20
2014	74,26	11,49	585,15	3,57	35,89	3,16	56,29	17,08	99,04	0,54
2015	78,02	5,06	594,26	1,56	36,97	3,01	56,06	-0,41	99,08	0,04
2016	80,89	3,68	614,53	3,41	38,12	3,11	59,93	6,90	99,46	0,38
Rata-rata	70,90	4,39	526,84	8,26	34,54	3,64	53,57	2,25	97,85	0,62

Sumber : BPS dan Kemendikbud, 2010-2016(Data diolah)

Hal ini merupakan suatu fenomena dalam sistem pendidikan di Indonesia, dimana pada saat ini pemerintah sudah mengalokasikan 20% dana dari APBN dan APBD untuk pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Diharapkan dengan program pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan pemerintah melalui pendidikan tersebut dapat meningkatkan partisipasi pendidikan di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anak usia 16-18 tahun yang masih belum mengenyam pendidikan.

Beberapa studi terdahulu banyak yang telah menguji mengenai hal-hal yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah maupun angka putus sekolah. Dari sisi pemerintah, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan ternyata memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap suatu capaian pendidikan. Pengaruh positif ditunjukkan oleh studi Jolianis (2015) yang menyimpulkan dalam studinya dimana terdapat pengaruh yang signifikan anggaran sektor pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Adanya peningkatan anggaran sektor pendidikan akan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Adanya anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan tentunya akan dapat membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan sehingga masyarakat akan mendapatkan pendidikan dengan biaya murah dan bahkan kalau bisa adanya pendidikan yang gratis untuk masyarakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Namun hasil yang sebaliknya ditunjukkan

dalam studi Huda dan Sasana (2013) yang menyimpulkan dalam studinya bahwa dampak desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah.

Peranan pemerintah di bidang pendidikan merupakan faktor penting bagi perkembangan pendidikan. Melalui kebijakannya terutama melalui anggaran pendidikan pemerintah dapat berupaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Jika dilihat dari Tabel.1.1 data pengeluaran pemerintah untuk pendidikan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010-2016 dan dengan rata-rata pertumbuhan APBD pendidikan yaitu sebesar 8,26 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan APK usia 16-18 tahun angka pertumbuhan APBD pendidikan pada tahun 2011 berbanding positif terhadap pertumbuhan APK, yang mana pertumbuhan APBD pendidikan mengalami peningkatan 17,09 persen diiringi dengan kenaikan pertumbuhan APK yaitu sebesar 3,26 persen. Namun pada tahun 2013 pertumbuhan APBD pendidikan berbanding negatif dengan pertumbuhan APK, yang mana pada tahun tersebut kenaikan pertumbuhan APBD pendidikan sebesar 14,70 persen diiringi penurunan pada pertumbuhan APK usia 16-18 tahun yaitu sebesar -3,14 persen dari tahun sebelumnya.

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa kenaikan pertumbuhan APBD pendidikan tidak selalu diiringi dengan kenaikan pertumbuhan APK usia 16-18 tahun. Padahal jika dilihat dari sisi anggaran, sektor pendidikan merupakan sektor publik yang menjadi prioritas pada pembangunan, hal ini terlihat dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) terhadap sektor pendidikan. Besarnya alokasi anggaran sektor pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut harusnya diiringi oleh peningkatan partisipasi pendidikan terutama pada tingkat pendidikan menengah di Indonesia. Yang mana dengan adanya anggaran pendidikan dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas dan murah sehingga dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menyekolahkan anggota rumah tangganya masing-masing, sehingga diharapkan tingkat partisipasi sekolah daerah bersangkutan akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan.

Selain pengeluaran pemerintah faktor lain yang mempengaruhi partisipasi pendidikan adalah pendapatan. Todaro dan Smith (2004) menyatakan bahwa lamanya pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh kombinasi pengaruh beberapa variabel sebagai berikut : perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari pendidikan.

Pendapatan seseorang tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan membiayai anak/keluarga sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kebutuhan anak yang bermacam-macam dalam bersekolah menuntut orang tua harus siap secara materil dalam membiayai sang anak. Semakin besar pendapatan orang tua maka akan

semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk melihat rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah kita dapat melihat dari PDRB perkapita daerah tersebut. Dari Tabel.1.1 dapat dilihat PDRB perkapita rata-rata di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana antara tahun 2010-2016 rata-rata PDRB perkapita sebesar Rp.34,54 juta. Jika dibandingkan terhadap pertumbuhan APK usia 16-18 tahun, terjadi hubungan positif pada tahun 2012, dimana kenaikan pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 4,00 persen diiringi kenaikan pertumbuhan APK sebesar 6,01 persen. Sedangkan pada tahun 2013 kenaikan pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 4,63 persen diiringi penurunan pertumbuhan APK sebesar -3,14 persen. Dari data tersebut dapat dilihat pertumbuhan yang terjadi pada PDRB perkapita tidak selamanya akan meningkatkan APK usia 16-18 tahun di Indonesia.

Studi terdahulu mengenai pengaruh pendapatan terhadap pendidikan telah banyak dilakukan. Jolianis (2015) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan perkapita terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan penelitian dari Asmara dan Sukadana (2016) menyimpulkan bahwa pendapatan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan siswa/siswi untuk putus sekolah di Kabupaten Buleleng, Bali.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat APK usia 16-18 tahun adalah daya tampung SMA yang ada di setiap daerah. Semakin banyak jumlah dan fasilitas sekolah SMA di tiap daerah maka akan semakin besar peluang seseorang di daerah

tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Dalam Elfindri (2001), bahwa dari sisi permintaan, yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yakni dengan relatif rendahnya proporsi anak yang tidak terdaftar sekolah karena alasan letak sekolah yang jauh dengan tempat tinggal dan tidak di terima di sekolah. Jadi jika semakin besar daya tampung terutama di sekolah yang ada di daerahnya maka akan semakin besar kemungkinan anak di masing-masing daerah untuk melanjutkan pendidikan ke SMA.

Dari Tabel.1 dapat dilihat angka persentase daya tampung SMA di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 53,57 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan APK usia 16-18 tahun, antara tahun 2010-2016 selalu terjadi hubungan positif, yang mana kenaikan pertumbuhan daya tampung SMA selalu diiringi kenaikan pertumbuhan APK 16-18 tahun, begitu juga sebaliknya.

Peningkatan jumlah dan fasilitas sekolah merupakan hal yang sangat positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, tapi kembali lagi sejauh mana pembangunan tersebut bisa menjangkau setiap daerah di Indonesia sehingga tidak hanya pembangunan tersebut terkonsentrasi di kota tapi juga perdesaan di Indonesia. Dengan demikian akan semakin besar peluang bagi penduduk yang ada di daerah terpencil untuk bisa mengenyam pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi pendidikan usia 16-18 tahun adalah besarnya angka kelulusan tingkat SMP di Indonesia. Untuk memiliki kualitas dan pengetahuan yang baik masyarakat Indonesia harus mengenyam

pendidikan setinggi-tingginya. Adanya minat seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena banyak manfaat yang akan didapat jika siswa lulusan jenjang pendidikan SMP melanjutkan ke tingkat SMA. Dengan melanjutkan ke SMA maka siswa akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Kesempatan kerja akan jauh lebih banyak didapat jika seseorang telah memiliki pendidikan yang tinggi. Penghasilan yang didapat saat bekerja juga akan lebih tinggi dari mereka yang hanya lulusan jenjang pendidikan menengah pertama. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih dihormati dalam lingkungan masyarakat maupun pekerjaan.

Minat dan keinginan seseorang terhadap pendidikan dalam hal ini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tentu juga harus didorong dari sisi permintaan dan penawaran. Todaro dan Smith (2006) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang, walaupun banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat non pasar, secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan barang ataupun jasa ekonomi lainnya. Tingginya angka kelulusan SMP akan berarti permintaan pendidikan untuk jenjang SMA akan semakin meningkat.

Dari data pada Tabel.1.1 dapat dilihat angka persentase kelulusan siswa SMP di Indonesia sangatlah tinggi dari tahun ke tahun, dimana angka kelulusan SMP selalu meningkat dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 tingkat kelulusan SMP mencapai 98,31 persen dan terus meningkat hingga tahun 2016 sebesar 99,46 persen.

Hal ini tentu akan berdampak pada tingginya permintaan terhadap sekolah SMA dan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pendidikan Kasar Usia 16-18 Tahun di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang penulis teliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia?
2. Sejauh mana pengaruh pendapatan perkapita terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia?
3. Sejauh mana pengaruh daya tampung SMA terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia?
4. Sejauh mana pengaruh tingkat kelulusan SMP terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia?
5. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita, daya tampung SMA, dan tingkat kelulusan SMP bersama-sama terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia.
2. Pengaruh pendapatan perkapita terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia.
3. Pengaruh daya tampung SMA terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia.
4. Pengaruh tingkat kelulusan SMP terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia.
5. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita, daya tampung SMA dan tingkat kelulusan SMP secara bersama-sama terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu ekonomi.
2. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita, daya tampung SMA, dan tingkat kelulusan SMP, terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia. Dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi pihak pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam menyusun

strategi pembangunan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan pembangunan pendidikan daerahnya.

4. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah yang sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Modal Manusia (Human Capital)

Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Investasi awal dilakukan, maka dapat dihasilkan suatu aliran penghasilan masa depan dari perbaikan pendidikan dan kesehatan. Investasi pada bidang sumber daya manusia adalah pengorbanan sejumlah dana (sesuatu yang dapat diukur dengan nilai uang) yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Penghasilan yang diperoleh pada masa akan datang adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula, investasi yang demikian disebut *human capital*.

Modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Menurut Todaro dan Smith (2004), sumber daya manusia dari suatu bangsa, bukan modal fisik atau sumber daya material, merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan

pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan. Jadi sumber daya manusia merupakan faktor produksi utama dibandingkan sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Dimana semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara.

Sumber daya manusia dapat berubah menjadi modal manusia melalui input efektif nilai-nilai pendidikan, kesehatan dan moral. Transformasi sumber daya manusia mentah menjadi sumber daya manusia yang sangat produktif melalui input-input tersebut adalah proses pembentukan modal manusia. Jadi modal manusia memiliki pengertian persediaan kompetensi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, cita-cita, kesehatan, dan sebagainya yang merupakan hasil pengeluaran atau pembelanjaan di bidang pendidikan, program perawatan dan pemeliharaan kesehatan (Todaro dan Smith 2006).

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperotek beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja (Muhi, 2010).

Pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara Asia dan perubahan progresif dalam produksi menuju industri dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya SDM yang terampil dan terdidik (berkualitas). SDM sebagai tenaga kerja sangat diperlukan keterampilannya dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kualitas organisasi dan menunjang pertumbuhan ekonomi (Sulistyowati, 2010).

Pendidikan menjadi salah satu komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan di suatu negara. Peran ganda pendidikan yaitu sebagai input dan output membuat pendidikan menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, dan lamanya dalam menempuh pendidikan akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan pendidikannya yang lebih rendah. Apabila upah pekerja mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak penduduk yang memiliki pendidikan tinggi, maka semakin tinggi produktivitas dan ekonomi nasional akan tumbuh dengan baik.

2. Partisipasi Pendidikan

Definisi pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab 1 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan definisi partisipasi menurut Tilaar (2009) adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi juga berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil –hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pendidikan merupakan peran serta seseorang atau masyarakat yang secara sadar mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi dirinya. Indikator yang digunakan pemerintah untuk melihat seberapa jauh keberhasilan usaha pemerintah di sektor pendidikan, yaitu dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dalam penelitian ini menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mewakili indikator keberhasilan sektor pendidikan.

Menurut BPS (2018) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini

disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Meningkatnya partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pendidikan.

3. Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesubroto (2008) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran yang akan menikmati kebijakan tersebut.

Teori Hukum Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan

meningkat. Menurut Wagner mengapa peranan pemerintah semakin besar, disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesubroto, 2008).

Pengeluaran pemerintah dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Menurut Sukirno (2004) penentu pengeluaran pemerintah diantaranya tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, misalnya pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur dan mengembangkan pendidikan.

Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, bahkan setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya. Dengan di terapkannya kebijakan desentralisasi fiskal maka kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi semakin besar, karena proses pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pusat ke daerah berdasarkan pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Menurut Jolianis (2015) tujuan diberlakukannya desentralisasi adalah terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, adanya pengembangan keberagaman potensi peserta didik dan lingkungan dalam konteks kurikulum diversifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, serta sistem penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, desentralisasi merupakan program peningkatan tanggung jawab yang lebih besar untuk pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, salah satunya meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat.

Beberapa studi terdahulu banyak yang telah menguji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pendidikan dari sisi pemerintah. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan ternyata memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap suatu capaian pendidikan. Pengaruh positif ditunjukkan oleh beberapa studi di antaranya oleh Guryan (2001), Dauda

(2001), serta Litsching dan Morrinson (2013). Namun demikian hasil yang sebaliknya ditunjukkan dalam studi Al-Samarrai (2003) dan Rajkumar dan Swaroop (2008) bahwa terdapat hubungan yang lemah antara belanja pemerintah di bidang pendidikan dengan capaian pendidikan.

Handa (2002) menyimpulkan dalam studinya, intervensi dalam hal peningkatan partisipasi sekolah di tingkat dasar merupakan suatu kebijakan pembangunan yang sangat penting, walaupun kebijakan peningkatan angka partisipasi tidak dapat langsung dilaksanakan dan akan berbeda-beda antarnegara.

Dengan adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan pendidikan termasuk adanya kebijakan desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan di Indonesia. Dengan meningkatnya partisipasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia.

4. Pendapatan Perkapita

Untuk dapat mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk pada suatu daerah secara rata-rata dapat dilihat dari angka pendapatan perkapita atau PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah (Sukmaraga, 2011). Dengan demikian pendapatan perkapita pada satu tahun

didapat dengan jalan membagi pendapatan pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata standar hidup penduduk telah meningkat. Selain itu pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk menggambarkan standar hidup suatu daerah/negara dari tahun ke tahun. Negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi secara umum akan lebih mampu meningkatkan kualitas modal manusianya dibandingkan negara-negara miskin. Hubungan ini didasarkan atas pandangan sejumlah ekonom bahwa modal manusia layaknya barang normal. Sebagai barang normal, secara umum orang akan "membeli" lebih banyak modal manusia jika pendapatannya naik (Todaro dan Smith, 2004).

Pendapatan perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah/negara. Perbedaan tingkat pendapatan dapat mencerminkan perbedaan kualitas hidup. Hal ini tentu akan mendorong pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi setiap kebutuhan termasuk memenuhi biaya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Todaro dan Smith (2004) menyatakan bahwa lamanya pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh kombinasi pengaruh beberapa variabel sebagai berikut : perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern

dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari pendidikan.

Beberapa studi terdahulu banyak yang telah menguji mengenai pengaruh pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah maupun angka putus sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Richa Susyanthi (2017) bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat di Kabupaten Lampung Timur. Dimana peningkatan PDRB per kapita masyarakat akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SMA di Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian lain dilakukan oleh Jolianis (2015) dimana terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan perkapita terhadap Angka Partisipasi Sekolah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan dari pendapatan perkapita akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Dengan pendapatan yang tinggi seseorang dapat memenuhi semua kebutuhannya. Pendapatan yang tinggi juga bisa membuat orang tua mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karna

semakin tinggi pendidikan akan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi orang tua terhadap pendidikan anaknya.

5. Daya Tampung Sekolah

Menurut BPS (2018) daya tampung sekolah adalah banyaknya calon siswa yang dapat diterima menjadi siswa dengan mempertimbangkan fasilitas dan daya dukung yang dimiliki suatu sekolah. Daya tampung sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam memenuhi sarana prasarana sekolah.

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut rumusan Tim Penyusunan Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Daryanto, 2013).

Dengan semakin ditingkatkannya sarana prasarana pendidikan maka akan dapat meningkatkan daya tampung sekolah terhadap calon siswa yang akan masuk ke sekolah tersebut. Upaya peningkatan daya tampung sekolah harus diupayakan bagi setiap sekolah yang ada di daerah masing-masing agar dapat membantu setiap siswa yang ada di daerah tersebut untuk melanjutkan

sekolah. Karna dari sisi permintaan, yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yakni dengan relatif rendahnya proporsi anak yang tidak terdaftar sekolah karena alasan letak sekolah yang jauh dengan tempat tinggal dan tidak di terima di sekolah (Elfindri, 2001).

Todaro dan Smith (2006) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang, walaupun banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat non pasar, secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan barang ataupun jasa ekonomi lainnya. Sekolah sebagai supply dalam pendidikan harus mampu meningkatkan sarana prasarananya, sehingga sekolah akan mampu meningkatkan daya tampungnya dan bisa menyeimbangkan terhadap permintaan calon siswa yang semakin lama akan semakin meningkat.

Beberapa studi di antaranya yaitu studi dari Filmer (2000) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel yang termasuk dalam sisi penawaran dan permintaan terhadap angka partisipasi sekolah. Studi tersebut menggunakan data dari 21 negara sedang berkembang dan ditemukan bahwa pembangunan sekolah di daerah yang belum ada sekolah, yang juga mempengaruhi adanya penurunan biaya perjalanan dan waktu tempuh ke sekolah, memang akan meningkatkan partisipasi sekolah namun pengaruhnya sangat kecil.

Semakin besar kemampuan daya tampung sekolah di tiap daerah berarti meningkatkan kesempatan bagi penduduk usia sekolah untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ini merupakan sebuah keharusan karena dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah tentu harus diiringi dengan peningkatan daya tampung sekolah dan sarana prasarana pendukung. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dapat membantu agar tujuan pendidikan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia.

6. Angka Kelulusan

Untuk memiliki kualitas dan pengetahuan yang baik masyarakat Indonesia harus mengenyam pendidikan setinggi – tingginya. Agar dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seseorang harus menamatkan pendidikan mulai dari jenjang sekolah yang paling rendah mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat (BPS,2018).

Tingkat kelulusan merupakan salah satu output pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dalam rencana kerja perangkat daerahnya, dimana dari tingkat kelulusan tersebut dapat dilihat tingkat keberhasilan pendidikan di setiap jenjang sekolah. Tingginya tingkat kelulusan berarti akan meningkatkan permintaan pendidikan ke jenjang sekolah berikutnya.

Todaro dan Smith (2006) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang, walaupun banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat non pasar, secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan barang ataupun jasa ekonomi lainnya. Permintaan individu mengacu pada permintaan akan pendidikan pada level individu. Setiap orang memutuskan pendidikan, pelatihan dan keahlian untuk membekali dirinya agar tetap eksis dalam kehidupan bermasyarakat yang kompetitif. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tersedia lapangan pekerjaan maupun peluang kerja. Peluang kerja ini sangat beragam baik dari sisi keahlian, pendidikan maupun gaji yang ditawarkan. Setiap individu menginginkan pekerjaan yang baik dengan tingkat gaji yang layak sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki berdasarkan tingkat pendidikan dan pelatihan yang telah diselesaikan. Peluang karir yang baik seseorang didorong oleh

dirinya maupun keluarganya dalam menginvestasikan uangnya untuk pendidikan yang lebih baik dan kualifikasi yang lebih tinggi.

Karena jumlah pendidikan yang diminta sangat menentukan tingkat penawarannya (dalam batas-batas kelayakan finansial pemerintah), sebaiknya banyak dilakukan kajian terkait dengan determinan-determinan dari permintaan pendidikan ini baik faktor-faktor ekonomi maupun nonekonomi. Namun karena hampir seluruh jasa dan fasilitas pendidikan pada negara-negara sedang berkembang disediakan oleh pemerintah, maka faktor-faktor penentu dari sisi permintaan pendidikan jauh lebih penting dari pada faktor-faktor penentu dari sisi penawaran pendidikan (Todaro dan Smith, 2006).

B. Penelitian Terdahulu

Jolianis (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh alokasi anggaran sektor pendidikan, pendapatan perkapita dan pendidikan kepala rumah tangga terhadap angka partisipasi sekolah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan studi eksplorasi yang dilakukan pada seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2005-2008. Teknik analisis data yang digunakan untuk membuktikan dan menguji hipotesis yang diajukan adalah *regresi linear berganda*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari anggaran sektor pendidikan, pendapatan perkapita dan tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi sekolah.

Penelitian lain adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Huda dan Sasana (2013) tentang analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap outcomes pelayanan publik bidang pendidikan (studi kasus: provinsi DKI Jakarta). Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa outcomes bidang pendidikan yang digunakan sebagai variabel dependen adalah angka partisipasi sekolah SMA/SMK, angka putus sekolah SMA/SMK. Sedangkan untuk variabel intervening atau mediator dipilih angka kelulusan sebagai indikator capaian output pendidikan. Variabel desentralisasi fiskal di proksikan dengan realisasi belanja pemerintah kota dan kabupaten di Jakarta bidang pendidikan terhadap total belanja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Studi ini menggunakan analisis data panel, data yang digunakan adalah data time series selama 5 tahun terakhir yakni tahun 2006-2010 dan data cross section sebanyak 6 data yang mewakili kabupaten / kota di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap angka kelulusan sekolah, tingkat putus sekolah siswa, dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah.

Penelitian lain adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhierianto (2014) tentang analisis pengaruh DAU, DAK dan *pendapatan perkapita* terhadap angka partisipasi kasar tingkat sd di kabupaten/kota provinsi jawa tengah. Dimana pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan total sampel 20 kabupaten dan 3 kota dari populasi 35 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2003-2008. Penelitian ini menggunakan metode

regresi data panel dengan pendekatan *random effect model* (REM) untuk menganalisis data. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa DAU dan Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap APK tingkat Sekolah Dasar.

Penelitian lain adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmatin dan Soejoto (2017) tentang analisis pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kota Surabaya. Penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif ini memprediksikan pengaruh sosial-ekonomi melalui tingkat kemiskinan. Sementara itu, perubahan jumlah sekolah untuk menjangkau masyarakat ekonomi lemah, diharapkan dapat menyerap jumlah siswa, sehingga akan berpengaruh pada APS. Hasil uji regresi menunjukkan, tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah berpengaruh negatif secara signifikan sebesar 55,33% dimana pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah sebesar 22,62% dan 32,71%. Peningkatan kemiskinan diikuti oleh penurunan APS dan sebaliknya. Begitu pula kenaikan jumlah sekolah akan diikuti oleh penurunan APS.

Penelitian lain adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rodhiah Umaroh (2015) tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pendidikan Tinggi Di Indonesia Tahun 2006-2013”. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model* (FEM) untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan variabel tingkat lulusan sekolah menengah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pendidikan tinggi di Indonesia.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukkan keterkaitan antara variable yang akan diteliti berdasarkan perumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah (X1), pendapatan perkapita (X2), daya tampung SMA (X3) dan tingkat kelulusan SMP (X4) terhadap APK usia 16-18 tahun (Y) di Indonesia.

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 16-18 Tahun

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dengan adanya bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah tentu akan dapat mengurangi beban keluarga yang kurang mampu untuk bisa menyekolahkan anak/keluarganya ke jenjang yang lebih tinggi. Termasuk untuk jenjang SMA, dengan adanya anggaran pemerintah untuk pendidikan akan mampu meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun.

2. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 16-18 Tahun.

Permintaan barang dan jasa dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada permintaan terhadap pendidikan. Keluarga dengan tingkat pendapatan rendah (menengah ke bawah) sangat memperhatikan elemen biaya karena mereka harus memastikan pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer yang ada barulah kebutuhan sekunder dan tersier.

Semakin rendah pendapatan masyarakat akan semakin kecil minat mereka dalam menyekolahkan keluarganya terlebih pada jenjang sekolah yang lebih tinggi dan sebaliknya semakin tinggi pendapatan masyarakat akan semakin besar pula kesadaran mereka untuk menyekolahkan keluarganya pada pendidikan yang semakin tinggi.

3. Pengaruh Daya Tampung SMA terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 16-18 Tahun

Daya tampung sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam memenuhi sarana prasarana sekolah. Semua fasilitas memadai diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah harus diiringi dengan peningkatan daya tampung sekolah dan sarana prasarana pendukung. Termasuk untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), semakin meningkatnya jumlah

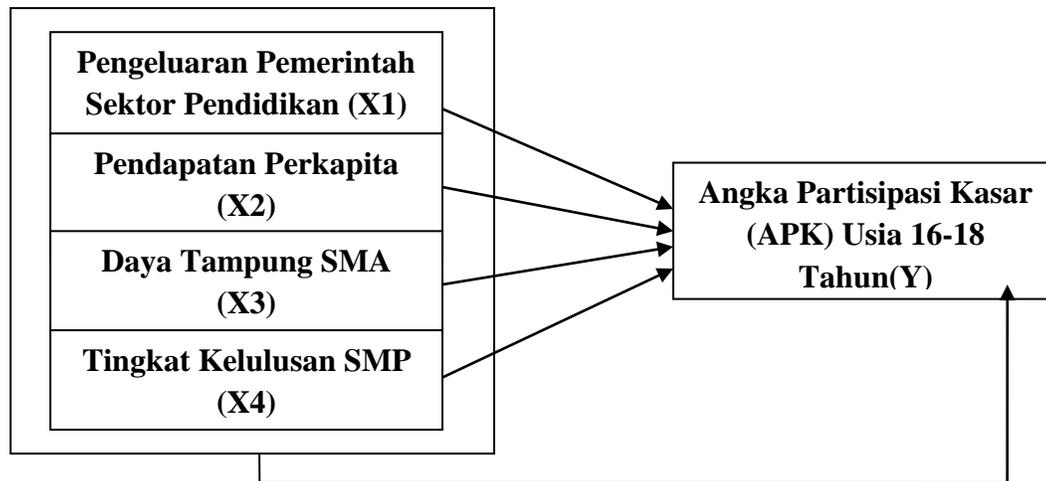
lulusan SMP harus segera diikuti dengan peningkatan daya tampung SMA itu sendiri. Sehingga dengan meningkatnya daya tampung SMA akan mampu meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia 16-18 tahun.

4. Pengaruh Tingkat Kelulusan SMP terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 16-18 Tahun

Untuk memiliki kualitas dan pengetahuan yang baik masyarakat Indonesia harus mengenyam pendidikan setinggi – tingginya. Maka setiap orang harus menamatkan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah mulai dari SD, SMP dan SMA. Bagi siswa SMP agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maka ia harus menamatkan pendidikan pada jenjang SMP.

Semakin banyak siswa SMP yang lulus berarti permintaan terhadap pendidikan SMA akan semakin meningkat. Dengan demikian akan berdampak pada semakin giatnya pembangunan sarana dan prasarana sekolah SMA baik oleh pemerintah maupun swasta. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan partisipasi pendidikan usia 16-18 tahun di Indonesia.

Berdasarkan kajian teoritis yang dijelaskan maka dapat digambarkan bagan paradigma dalam penelitian ini. Berikut paradigma penelitian :



Gambar.1 Kerangka Konseptual Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 16-18 Tahun di Indonesia

D. Hipotesis

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang di kemukakan maka di ajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia.

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan perkapita terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia.

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$H_a: \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara daya tampung SMA terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat lulusan SMP terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia.

$$H_0: \beta_4 = 0$$

$$H_a: \beta_4 \neq 0$$

5. Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pendapatan perkapita, daya tampung SMA, dan tingkat lulusan SMP, terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia.

$$H_0: \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_a: \text{salah satu } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia. Dimana nilai probabilitasnya yaitu $0,55 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak mengakibatkan berubahnya partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia.
2. Pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia. Dimana nilai probabilitasnya yaitu $0,00 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada pendapatan perkapita mengakibatkan berubahnya Angka Partisipasi Kasar usia 16-18 tahun di Indonesia, yaitu disaat pendapatan perkapita meningkat juga menyebabkan partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia mengalami peningkatan.

3. Daya tampung SMA berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia. Dimana nilai probabilitasnya yaitu sebesar $0,00 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini diterima, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara daya tampung SMA terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada daya tampung SMA mengakibatkan berubahnya partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia. Dengan kata lain naik turunnya daya tampung SMA akan mempengaruhi partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia.
4. Tingkat kelulusan SMP berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia. Dimana nilai probabilitasnya yaitu $0,00 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada tingkat kelulusan SMP mengakibatkan berubahnya partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia.
5. Secara bersama-sama pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pendapatan perkapita, daya tampung SMA dan tingkat lulusan SMP berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia. Dimana dalam penelitian diperoleh probability(F-statistic) sebesar $0,00 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara bersama-sama keempat variabel bebas dalam penelitian ini

dapat mempengaruhi partisipasi pendidikan kasar Usia 16-18 tahun di Indonesia. Dengan sumbangan bersama-sama adalah sebesar 82,76 persen dan 17,24 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

B. Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka untuk dapat meningkatkan partisipasi pendidikan kasar usia 16-18 tahun di Indonesia, maka saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan lagi kebijakan publik berkaitan pendidikan. Termasuk alokasi anggaran pendidikan yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan mengontrol anggaran pendidikan tersebut agar bisa efektif sehingga tepat sasaran. Selanjutnya pemerintah harus meningkatkan perhatian pada setiap jenjang pendidikan termasuk SMA yang mana nilai APKnya masih rendah dibanding tingkat SD dan SMP di Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia harus lebih berupaya meningkatkan perekonomian nasional sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat karena pendapatan perkapita yang tinggi mencerminkan tingginya kesejahteraan penduduk di sebuah negara, yang mana dengan pendapatan yang tinggi masyarakat akan mampu memenuhi semua kebutuhannya termasuk pendidikan. Selain itu perlu sosialisasi oleh pemerintah terhadap

rumahtangga-rumahtangga yang pendapatan per kapitanya rendah dan tingkat pendidikan orang tuanya yang rendah, bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga mereka lebih peduli terhadap pendidikan anaknya.

3. Pemerintah Indonesia harus mendorong peningkatan infrastruktur pendidikan, yaitu dengan meningkatkan jumlah sekolah di setiap daerah dan memperbaiki fasilitas sarana pendidikan di setiap sekolah. Terutama daya tampung untuk sekolah negeri, karena walau bagaimanapun juga partisipasi pendidikan sangat erat kaitannya dengan biaya, dan sekolah negeri tentunya akan lebih bersahabat bagi penduduk ekonomi menengah ke bawah. Dengan demikian selanjutnya diharapkan akan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan di Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia harus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan kegiatan proses belajar mengajar yang baik dan efektif agar mampu menghasilkan lulusan yang banyak dan berkualitas. Dengan meningkatnya angka lulusan pada setiap jenjang pendidikan maka akan meningkatkan partisipasi ke jenjang pendidikan selanjutnya.
5. Dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pendapatan perkapita, daya tampung SMA, dan tingkat kelulusan SMP secara bersama-sama terhadap Angka Partisipasi Kasar usia 16-18 tahun di Indonesia, maka diharapkan kepada Pemerintah

untuk lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan publik dan makroekonomi. Selain itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan pihak swasta bersama-sama berupaya memajukan pendidikan di Indonesia seperti dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan dan pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin yang ada di Indonesia sehingga dengan demikian akan lebih mempermudah kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan partisipasi pendidikan di Indonesia.

6. Kepada peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16-18 tahun di Indonesia. Agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih optimal untuk meningkatkan partisipasi pendidikan khususnya kelompok umur 16-18 tahun di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhierianto,Rahmat. 2014. *Analisis Pengaruh DAU, DAK Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Angka Partisipasi Kasar Tingkat Sd Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2003-2008*. Semarang:Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Al-Samarrai, Samer. 2003. "Financing Primary Education for All: public expenditure and education outcomes in Africa." Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex.
- Asmara, Yuusufa Ramanda Indra dan Sukadana,I Wayan. 2016.*Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi? (Studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali)*.E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol 5, No. 12 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2010-2016. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Daryanto. 2013. *Inovasi Pembelajaran Efektif*. Bandung: CV Yrma Widya.
- Dauda, Risikat Oladoyin S. 2011. "Effect of Public Educational Spending and Macroeconomic Uncertainty on Schooling Outcomes: evidence from Nigeria." *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 16(31), 7-21.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah, 2010-2016. www.djpk.go.id
- Djaali. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Elfindri. 2001. *Ekonomi SDM*. UniversitasAndalas. Padang.
- Filmer, Deon. 2000. "The Structure of Social Disparities in Education: Gender and Wealth." Policy Research Working Paper 2268. Washington DC: World Bank.
- Gujarati, N. Damodar. 2004. *Basic Econometrics*, Fourth edition. New York: McGraw-Hill.
- Guryan, Jonathan. 2001. "Does Money Matter? regression-discontinuity estimates from education finance reform in Massachusetts." NBER Working Paper No. 8269, Cambridge: National Bureau of Economic Research.